

TINJAUAN TEORITIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DARI PERSPEKTIF *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*

Rahayu Anggraeni dan Kristanti Rahman

*Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap
hayu_ang@gmail.com dan kristantirahman@stiemuhcilacap.ac.id*

ABSTRACT

The aims of this research are to analyze (1) The effect of behavioral belief toward attitude, (2) The effect of normative belief toward subjective norm (3) The effect of control belief toward perceived behavioral control (4) The effect of attitude on taxpayer's intention toward compliance, (5) The effect of subjective norm on taxpayer's intention toward compliance, (6) The effect of perceived behavioral control on taxpayer's intention toward compliance, (7) The effect of taxpayer's intention toward compliance on mediate attitude, subjective norm and perceived behavioral control toward vehicle taxpayer compliance.

The hypotheses of this research are: (1) Behavioral belief has a significant effect toward attitude, (2) Normative belief has a significant effect toward subjective norm, (3) Control belief has a significant effect toward perceived behavior control (4) Attitude has a significant effect toward taxpayer's intention toward compliance, (5) Subjective norms has a significant effect toward taxpayer's intention toward compliance, (6) Perceived behavior control has a significant effect on taxpayer's intention toward compliance, (7) Taxpayer's intention toward compliance on mediate attitude, subjective norm and perceived behavioral control has a significant effect toward vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Behavioral Belief, Normative Belief, Control Belief, Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Taxpayer Intention toward Compliance, Motor Vehicle Tax Compliance, Theory of Planned Behavior.*

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, maka dari itu untuk mewujudkannya pemerintah menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi terbesar.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan APBN 2018 dari perpajakan nilainya Rp. 1.521,4 triliun atau 94% dari target APBN dan tumbuh 31,2% dari tahun sebelumnya, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nilainya Rp.407,1 triliun atau 147,8% dari target APBN dan tumbuh 30,8% dari tahun sebelumnya (dikutip dari cnbcindonesia.com). Dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak

yang lebih tinggi dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga pajak mempunyai peran yang penting dalam penerimaan negara.

Setiap fasilitas publik yang kita nikmati sebagai warga negara tidaklah dibangun dan disediakan begitu saja tanpa dana, dari fasilitas yang bersifat fisik seperti jalan raya, jembatan, penyebrangan, pelabuhan, bandara, terminal dan rumah sakit atau fasilitas yang sifatnya *intangible* (tidak bisa dilihat) seperti peyediaan keamanan, pelayanan kesehatan, pelayanan pembuatan KTP, pelayanan perizinan dan subsidi (BOS, BBM, PLN, pupuk, suku bunga) semuanya membutuhkan dana agar dapat berjalan dan terselenggara. Sederhananya, Pembangunan tidak akan mungkin dapat berjalan jika tidak memiliki dana yang bersumber dari pajak (Rusmana *et al.*, 2016:6).

Jenis pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Terdapat pajak daerah untuk tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Adapula Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang termasuk ke dalam pajak daerah untuk tingkat Provinsi, dimana dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT yang melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat, dengan melaksanakan inovasi layanan tersebut dirasakan adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten banyumas. Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mencapai target pajak, dimana pentingnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, situasi dimana seseorang mengetahui, mamahami dan mengerti tentang cara membayar pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam membayar pajak. Penerimaan pajak sangat ditentukan dari kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak perlu diindikasi secara lebih mendalam lagi faktor-faktor yang mempengaruhinya (Putri, 2014).

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan model penelitian Theory of Planned Behavior (TPB), dalam menggambarkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pada teori ini dijelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu terbentuk karena dasar niat (*intention*). Terdapat faktor *belief* yang mempengaruhi *intention*, diantaranya *behavioral belief* yang membentuk *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku), *normative belief* yang membentuk *subjective norm* (norma subjektif) dan *control belief* yang membentuk *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan) menurut Ajzen (1991) dalam Sholihah (2019).

Hasil dari penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan diantaranya, hasil penelitian Pangestu dan Rusmana (2012), Oktaviani dan Nurhayati (2015), Ari (2018), juga Mastani dan Khairani (2017). Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk menambahkan variabel faktor *beliefs* diantaranya *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten diantaranya pada penelitian Rahmadanty (2015), Kim, Ham, Yang dan Choi (2013), Yadav dan Pathak (2017) dan Ajina (2019).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Teoritis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari Perspektif**

Theory of Planned Behavior. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *behavioral belief*, *normative belief*, *control belief*, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, niat wajib pajak untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh *behavioral belief* terhadap sikap.
2. Untuk menganalisa pengaruh *normative belief* terhadap norma subjektif.
3. Untuk menganalisa pengaruh *control belief* terhadap kontrol perilaku yang dipersepsikan.
4. Untuk menganalisa pengaruh sikap terhadap niat wajib pajak untuk patuh.
5. Untuk menganalisa pengaruh norma subjektif terhadap niat wajib pajak untuk patuh.
6. Untuk menganalisa pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh.
7. Untuk menganalisa pengaruh niat wajib pajak untuk patuh memediasi sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148 dalam Oktaviani dan Nurhayati 2015). Menurut Santoso (2008) dalam Awaluddin dan Sukmawati (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tanpa harus dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan diterapkannya sanksi hukum atau administrasi.

2.2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) adalah pengembangan lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Pada teori ini dijelaskan bahwa timbulnya perilaku yang ditampilkan seorang individu dikarenakan adanya *intention* atau niat untuk berperilaku. Menurut teori ini, terdapat faktor utama *belief* (keyakinan) yang mempengaruhi niat, diantaranya *behavior belief* yang membentuk *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku), *normative belief* yang membentuk *subjektive norm* (norma subjektif) dan *control belief* yang membentuk *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan) dalam Ajzen (1991).

Menurut Ajzen (2005) dalam Sholihah (2019) mengemukakan bahwa adanya variabel lain yaitu faktor latar belakang yang mempengaruhi niat dan berkaitan dengan *belief*. Terdapat tiga faktor latar belakang yang terdiri dari:

- a. Faktor personal merupakan sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat keperibadian, nilai hidup, emosi dan kecerdasan yang dimikinya sehingga menjadi karakteristik.

- b. Faktor sosial merupakan faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan interaksi sosial diantaranya usia, jenis kelamin (gender), etnis, pendidikan, pendapatan dan agama.
- c. Faktor informasi merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif dalam berperilaku seperti pengalaman, pengetahuan dan paparan media.

Meskipun model TPB dapat menjelaskan perilaku individu secara umum, tetapi Bobek dan Hatfield (2003) dalam Purnomo (2016), mengemukakan jika adanya ketidaksamaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda ialah perasaan bersalah yang dimiliki oleh pihak lain. Disebut dengan norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*). Dapat diartikan bahwa kewajiban moral yaitu norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Konsep *Theory of Planned Behavior* dapat dilihat pada gambar 2.2.1 yang terdapat di lampiran.

2.2.1. Behavioral belief (Keyakinan perilaku)

Behavioral belief ialah keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*) dalam Pangestu dan Rusmana (2012). Dapat diartikan bahwa keinginan individu untuk menampilkan suatu perilaku bergantung pada evaluasi individu, apakah mempunyai evaluasi positif (bermanfaat, penting, menyenangkan, dan sebagainya) ataupun mempunyai evaluasi negatif (mengganggu, tidak penting, malas dan sebagainya) dalam Rahmadanty (2015).

2.2.2. Normative belief (Keyakinan normatif)

Normative beliefs adalah keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*) dalam Pangestu dan Rusmana (2012). Menurut Pookulangara (2011) dalam Rahmadanty (2015) definisi *normative belief* yaitu dimana seseorang memiliki keyakinan dimana adanya tekanan sosial dari individu atau kelompok tertentu yang berpendapat bahwa seseorang tersebut harus atau tidak harus melakukan perilaku.

2.2.3. Control belief (Keyakinan kontrol)

Control beliefs adalah keyakinan mengenai adanya berbagai hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*) dalam Pangestu dan Rusmana (2012). Sumber daya, kesempatan dan hal-hal yang mendukung tersebut diantaranya keterampilan, kemampuan, kehendak, pemaksaan, waktu, kesempatan dan ketergantungan orang lain (Ajzen, 1991 dalam Rahmadanty, 2015).

2.2.4. Sikap

Novita (2010) dalam Awaluddin dan Sukmawati (2017) menyatakan bahwa sikap sebagai kecenderungan seseorang untuk bertindak, berpersepsi dan berpikir terhadap objek, ide, situasi, atau nilai. Dengan kata lain sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok merupakan objek sikap. Evaluasi

atau respon mengenai pandangan seseorang pada suatu objek baik mendukung atau tidak mendukung dapat dikatakan sebagai sikap.

2.2.5. Norma Subjektif

Norma subjektif yaitu pandangan individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Norma subjektif dapat dikatakan sebagai harapan yang dipersepsikan individu yang mana satu atau lebih orang disekitarnya setuju terhadap perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi (Mustikasari, 2007 dalam Awaluddin dan Sukmawati, 2017). Tekanan sosial dapat membentuk norma subjektif seorang wajib pajak, artinya individu akan melakukan suatu tindakan sesuai dengan harapan orang-orang yang dianggap penting baginya (Miladia, 2010 dalam Pangestu dan Rusmana, 2012).

2.2.6. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat memberikan motivasi kepada individu yang akan berperilaku tersebut. Artinya, niat akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku menurut Ajzen (2002) dalam Lesmana, Panjaitan dan Maimunah (2015), kemudian kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat diartikan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dipersepsikan untuk melakukan perilaku (Ajzen dan Madden, 1986 dalam Rahmadanty, 2015).

2.2.7. Niat Wajib Pajak untuk Patuh

Niat berhubungan dengan motivasi yang terdapat pada diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu (Novita, 2010 dalam Awaluddin dan Sukmawati, 2017). Menurut Sulistomo (2012:12) dalam Mastani dan Khairani (2017) niat dapat dikatakan sebagai keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang timbul dari dalam diri setiap individu.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh *behavioral belief* terhadap sikap

Behavioral belief ialah keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*) dalam Pangestu dan Rusmana (2012). Seseorang memiliki keyakinan jika tingkah laku dapat memberikan hasil yang positif, maka ia akan memiliki sikap yang positif, dan jika tingkah laku dapat memberikan hasil yang negatif maka ia akan memiliki sikap yang negatif. Kaitannya dengan kepatuhan pajak yaitu seorang wajib pajak memiliki pilihan untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak berdasarkan pada keyakinan akan hasil yang akan didapatkan. Apabila wajib pajak merasa tidak akan ada hasil yang menguntungkan dan bermanfaat, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak patuh dalam membayar pajak, dan begitu pula sebaliknya apabila wajib pajak merasa akan ada hasil yang menguntungkan dan bermanfaat, maka wajib pajak akan memilih untuk patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama penelitian ini sebagai berikut:

H₁: *Behavioral belief* berpengaruh signifikan terhadap sikap.

2.3.2. Pengaruh *normative belief* terhadap norma subjektif

Menurut Pookulangara (2011) dalam Rahmadanty (2015) *normative belief* dapat diartikan bahwa seseorang memiliki keyakinan dimana adanya tekanan sosial dari individu atau kelompok tertentu yang berpendapat bahwa seseorang tersebut harus atau tidak harus melakukan perilaku. *Normative belief* tersebut akan mempengaruhi norma subjektif seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, maka dari itu apabila wajib pajak mendapat pengaruh dari individu atau kelompok dan memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok mengharapkan wajib pajak berperilaku, maka wajib pajak memiliki perilaku untuk menyetujui atau menolak pengaruh dari individu atau kelompok tersebut dalam kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua penelitian ini sebagai berikut:

H₂: *Normative belief* berpengaruh signifikan terhadap norma subjektif.

2.3.3. Pengaruh *control belief* terhadap kontrol perilaku yang dipersepsikan

Control beliefs adalah keyakinan mengenai adanya suatu hal yang dapat mendorong atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal yang dapat mendorong dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*) dalam Pangestu dan Rusmana (2012). Dengan kata lain, Jika seseorang mendapatkan dukungan kuat untuk mempengaruhi perilaku mereka ia akan merasa mudah untuk melakukan atau menampilkan sesuatu perilaku tertentu. Dukungan ini dimana adanya sumber daya yang cukup, kemauan, waktu, kesempatan, dan sebaliknya (Rahmadanty, 2015). Apabila wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki sumber daya, kesempatan dan hal-hal yang mendukung kepatuhan pajak, maka mereka memiliki persepsi bahwa mereka mampu dan mudah untuk patuh dalam membayar pajak, begitupula sebaliknya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut:

H₃: *Control belief* berpengaruh signifikan terhadap kontrol perilaku yang dipersepsikan.

2.3.4. Pengaruh sikap terhadap niat untuk patuh

Novita (2010) dalam Awaluddin dan Sukmawati (2017) mendefinisikan sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi dan berpikir dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap dapat berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok. Evaluasi atau respon perasaan individu baik mendukung atau tidak mendukung terhadap suatu objek dapat dikatakan sebagai sikap. Terdapat dua kemungkinan dimana wajib pajak memiliki sikap positif (mendukung) terhadap kepatuhan pajak atau memiliki sikap negatif (tidak mendukung) terhadap kepatuhan pajak. hal tersebut akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat penelitian ini sebagai berikut:

H₄: Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh.

2.3.5. Pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk patuh

Norma subjektif adalah pandangan individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Norma subjektif dapat dikatakan sebagai harapan yang dipersepsikan individu yang mana satu atau lebih orang disekitarnya menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi (Mustikasari, 2007 dalam Awaluddin dan Sukmawati, 2017). Norma subjektif tersebut akan memengaruhi niat wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, jika seorang wajib pajak menganggap orang-orang disekitarnya memiliki sikap positif terhadap pajak, sehingga wajib pajak akan patuh membayar pajak, sebaliknya jika wajib pajak menganggap orang-orang disekitarnya memiliki sikap negatif terhadap pajak, sehingga wajib pajak akan menghindari pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima penelitian ini sebagai berikut:

H₅: Norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh.

2.3.6. Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat untuk patuh

Ajzen (2002) dalam Lesmana, Panjaitan dan Maimunah (2015) menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat memberikan motivasi kepada individu yang akan berperilaku tersebut. Dalam arti bahwa, niat akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku. Apabila dikaitkan dengan kepatuhan pajak adalah jika wajib pajak memiliki kontrol perilaku yang dipersepsikan yang lebih tinggi, maka keinginan atau niat untuk mematuhi ketentuan perpajakan, sebaliknya jika seseorang memiliki kontrol perilaku yang dipersepsikan yang rendah, maka wajib pajak memiliki niat yang rendah untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis keenam penelitian ini sebagai berikut:

H₆: Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh.

2.3.7. Pengaruh niat untuk patuh memediasi sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Niat berhubungan dengan motivasi yang berada dalam diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu (Novita, 2010 dalam Awaluddin dan Sukmawati, 2017). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat memiliki peran sebagai perantara dalam membentuk perilaku. Timbulnya perilaku yang ditampilkan seorang individu dikarenakan adanya *intention* atau niat untuk berperilaku. Niat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Niat wajib pajak untuk patuh merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk berperilaku patuh pada peraturan pajak (Pangestu dan Rusamana, 2012).

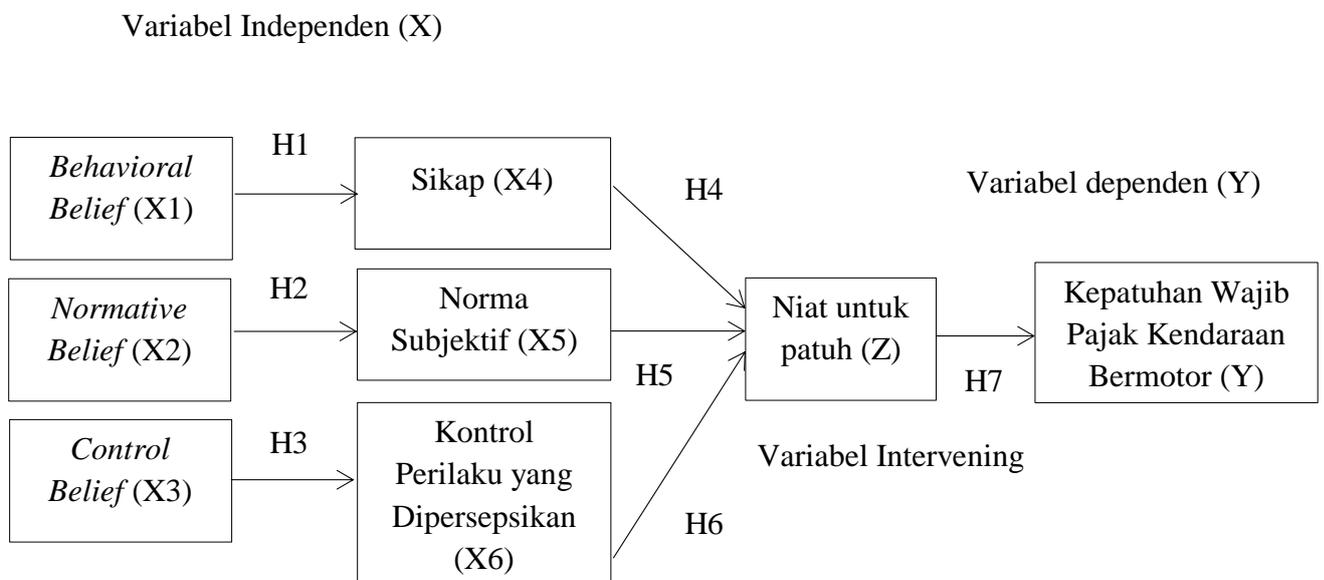
Kecenderungan artinya kecondongan seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak, selanjutnya keputusan artinya keputusan yang dipilih wajib pajak untuk menentukan patuh atau tidak patuh dalam memenuhi

kewajiban pajak. Seorang wajib pajak beranggapan bahwa dengan membayar pajak akan memberikan keuntungan, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak, dan begitupula sebaliknya apabila seorang wajib pajak beranggapan bahwa dengan membayar pajak akan memberikan kerugian, maka wajib pajak akan tidak patuh dalam membayar pajak atau menghindari membayar pajak (Pangestu dan Rusmana, 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketujuh penelitian ini sebagai berikut:

H7: Niat untuk patuh memediasi pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3. Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini dapat di lihat pada Gambar 1 yang terdapat di Gambar 1 Model Penelitian.



Gambar 1. Model Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Behavioral Belief
2. Normative Belief
3. Control Belief
4. Sikap
5. Norma Subjektif
6. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan
7. Niat Wajib Pajak untuk Patuh
8. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Indikator dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 2 penjelasan variabel dan indikatornya.

Tabel 2 Variabel dan Indikatornya

| Variabel | Indikator | Simbol |
|--|--|---------------|
| <i>Behavioral Belief</i> | Kepercayaan akan manfaat melaksanakan kepatuhan pajak. | X1.1 |
| | Keuntungan dari melaksanakan kepatuhan pajak. | X1.2 |
| | Konsekuensi dari tidak melaksanakan kepatuhan pajak. | X1.3 |
| | Hasil yang didapat dari melaksanakan kepatuhan pajak. | X1.4 |
| <i>Normative Belief</i> | Harapan orang-orang sekitar untuk melaksanakan kepatuhan pajak. | X2.1 |
| | Kepercayaan bahwa orang-orang sekitar berharap wajib pajak melaksanakan kepatuhan pajak. | X2.2 |
| | Ajakan untuk melaksanakan kepatuhan pajak. | X2.3 |
| | Keinginan sesama wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak. | X2.4 |
| <i>Control Belief</i> | Waktu yang dimiliki untuk melaksanakan kepatuhan pajak. | X3.1 |
| | Sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kepatuhan pajak. | X3.2 |
| | Kesempatan untuk melaksanakan kepatuhan pajak. | X3.3 |
| | Persepsi kemungkinan melaksanakan kepatuhan pajak. | X3.4 |
| Sikap | Nilai kebaikan kepatuhan pajak. | X4.1 |
| | Nilai kemanfaatan kepatuhan pajak | X4.2 |
| | Nilai kenyamanan kepatuhan pajak. | X4.3 |
| | Perilaku patuh merupakan upaya taat hukum. | X4.4 |
| | Penilaian terhadap hukum perpajakan. | X4.5 |
| Norma Subjektif | Pelaksanaan kepatuhan pajak oleh orang-orang sekitar | X5.1 |
| | Pendapat teman tentang kepatuhan pajak | X5.2 |
| | Pendapat petugas pajak tentang kepatuhan pajak | X5.3 |
| | Harapan dan dukungan teman terhadap kepatuhan pajak | X5.4 |
| | Harapan dan dukungan petugas pajak terhadap kepatuhan pajak | X5.5 |
| Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan | Keputusan pribadi untuk melaksanakan kepatuhan pajak | X6.1 |
| | Kesanggupan untuk dapat melaksanakan kepatuhan pajak | X6.2 |
| | Kemungkinan untuk melaksanakan kepatuhan pajak | X6.3 |
| | Tingkat kesulitan melaksanakan kepatuhan pajak | X6.4 |
| Niat Wajib Pajak untuk Patuh | Keinginan untuk melaksanakan kepatuhan pajak | Z.1 |
| | Rencana untuk melaksanakan kepatuhan pajak | Z.2 |
| | Usaha untuk melaksanakan kepatuhan pajak | Z.3 |
| Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Y.1 |
| | Membayar pajaknya tepat pada waktunya | Y.2 |
| | Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya | Y.3 |
| | Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran | Y.4 |

5. Kesimpulan dan Penutup

5.1. Kesimpulan

1. *Behavioral belief* berpengaruh signifikan terhadap sikap.
2. *Normative belief* berpengaruh signifikan terhadap norma subjektif.
3. *Control belief* berpengaruh signifikan terhadap kontrol perilaku yang dipersepsikan.
4. Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh.
5. Norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh.
6. Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh.
7. Niat untuk patuh memediasi pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5.2. Implikasi

1. Dapat diketahui berdasarkan kesimpulan dan sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) bahwa kepatuhan pajak adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya niat untuk patuh. Timbulnya niat dipengaruhi oleh faktor *belief* (keyakinan), diantaranya *behavioral belief* yang membentuk sikap, *normative belief* yang membentuk norma subjektif dan *control belief* yang membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan. Agar wajib pajak memiliki niat untuk patuh maka diperlukannya peran dari pemerintah dan petugas pajak untuk menerapkan peraturan pajak kepada wajib pajak dengan tegas dan adil.
2. Perlu juga diperhatikannya aspek psikologis wajib pajak selama pelaksanaan penyuluhan pajak, maka dapat mendukung wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya.
3. Cara yang dapat dilakukan agar wajib pajak memiliki niat untuk patuh yaitu dengan penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak yang melaksanakan kepatuhan perpajakannya, serta menerapkan sistem yang efektif dan sederhana juga pelayanan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50. 179-211.
- , I. (2002). Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration. September (Revised January, 2006).
- Ari, D. P. S. (2018). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory Of Planned Behavior dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Jurnal Profita*. 13.
- Awaluddin, M., & Sukmawati. (2017). Implikasi *Theory Of Reasoned Action* dan Etika Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Niat (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. 1. 79-95.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2019). Pajak kendaraan Bermotor. Tulisan pada <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*.
- Icek Ajzen. (2019). Theory of Planned Behavior with Background Factors. Diakses 13 November 2019, dari <https://people.umass.edu/aizen/tpb.html>.
- Jogiyanto. (2011). *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPM Yogyakarta.
- Kim, E., Ham, S., Yang, S. I., & Choi, J. G. (2013). The roles of attitude, subjective norm, and perceived behavioral control in the formation of consumers' behavioral intentions to read menu labels in the restaurant industry. *International Journal of Hospitality Management*. 203-213.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah M. (2015). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi*. 13. 354-366.
- Mastani, C., & Khairani, S. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Dengan Niat Kepatuhan Sebagai Variabel Intervening Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa PPN (Survei Pada PKP Yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang).
- Oktaviani, R. M., & Nurhayati, I. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi dari Perspektif *Planned Behaviour Theory*. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers*.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Tax Compliance* Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2011.

- Purnomo, M. L. S. (2016). *Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Undegraduate skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Gresik.*
- Putri, Layli Y. (2014). Pengaruh sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Jurnal Profita.*
- Rahmadanty, Cecia. (2015). Analisis Niat Perilaku Anggota Komunitas Hijabers Surabaya Dalam Menggunakan Tabungan Syariah: Perspektif Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan.*
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rusmana, Oman. (2016). *1001 Hal Tentang Pajak.* Jakarta Selatan: SMART.
- Sholihah, M. (2019). Pengembangan Model Peran Keluarga Terhadap Sedentary Lifestyle Remaja Berbasis Family Centered Nursing dan Theory of Planned Behaviour. Tesis Fakultas Keperawatan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi.* 5.
- Yadav, R., & Pathak, G. S. (2017). Determinants of Consumers' Green Purchase Behavior in a Developing Nation: Applying and Extending the Theory of Planned Behavior. *Ecological Economics.* 134.